

SKRIPSI

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH:

SALMAN ALFARISI
NIM.10775000019

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012**

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Oleh :

Salman Alfarisi
NIM. 10775000019

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Apit dan kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten siak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pengawasan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, queisioner, dan observasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran

Dalam penelitian ini, peranan pemerintah daerah kabupaten dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet (studi kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dilihat dari wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, yaitu dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian sarang burung walet terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak. dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub variabel penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa peranan pemerintah daerah kabupaten dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet (studi kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Tidak Terlaksana Dengan Baik.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis **Ayahanda Muslimin dan Ibunda Rusni**, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mahmuzar, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H.Syahrial, S.E selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak, dan kepada seluruh pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak, bantuannya tidak akan penulis lupakan.
7. Instansi-instansi terkait dalam mendapatkan informasi penelitian penulis: yaitu: Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Siak, Dispenda Kabupaten Siak, pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Politik, dan Tokoh Agama Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang telah memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan.
8. Buat keluarga Abang Azwardi, S.Pdi, dan Khairunnas, semoga abang-abang penulis selalu dimudahkan rezekinya serta bahagia dunia akhirat

9. Buat adik-adikku Muhammad Burhan, Jumrotul Aini, Nurhafizah Dan David Ilham, mudah-mudahan kelak kita menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, Amin.
10. Spesial buat adinda Sri Wahyuningsih, seseorang yang telah memberikan perubahan dalam hidup penulis, makasih support dan doa'nya ya Dek.... Semoga kita selalu sukses dan mendapatkan apa yang kita impikan. Amin...
11. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal B angkatan 07 Jurusan Administrasi Negara; Muhammad Darbi, Alfian Alkautsar, Asril Ramdhan, Nurhasanah, Irwandi, Bambang Sugito, Komaruddin, Ribut Wahyuni, Asriati, Pramita Rusadi, Guntur Alamsyah, Broto Wiguna dan Yayan Tri Wahyudi yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman Pengurus HMJ-ANA priode 2010-2011, Pengurus Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak (GMPKS) priode 2011 2012, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, *you're all my best friend*.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “*Jazakumullah Khairan Katsiran*” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 01 Januari 2012
Penulis

SALMAN ALFARISI
10775000019

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Peranan	12
2.2 Pemerintah Daerah	13
2.3 Pengawasan	16
2.4 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Mengontrol Penangkaran Sarang Burung Walet	21
2.5 Konsep Operasional.....	27
2.6 Hipotesa	28
2.7 Variabel Penelitian.	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Jenis Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
3.6 Analisa Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Kondisi Geografis Dan Monografi Kecamatan Sungai Apit	35

1. Sejarah Kecamatan	35
2. Keadaan Alam	37
3. Luas Wilayah	38
4. Batas-Batas Wilayah.....	38
5. Jumlah Penduduk.....	39
4.2 Sejarah Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit	40
4.3 Keberadaan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak	41
1. Sejarah BLH.....	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi BLH	42
3. Struktur Organisasi	43
3. Visi dan Misi BLH	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Responden.....	50
1. Jenis Kelamin Responden.....	50
2. Tingkat Usia Responden.....	51
3. Tingkat Pendidikan Responden	52
5.2 Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)	53
1. Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet	55
2. Lokasi Prioritas Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit.....	64
3. Perizinan Penangkaran Walet	73
4. Suara Pita Kaset Burung Walet.....	82
5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Sub Variabel Penelitian	88
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran	96

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Sungai Apit.....	4
Tabel I.2	Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Hanya Mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Tidak Memiliki Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	6
Tabel III.1	Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian	33
Tabel IV.1	Luas Wilayah Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2009	38
Tabel IV.11	Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Apit Berdasarkan Suku-Suku Yang Ada Tahun 2009	39
Tabel V.1	Jenis Kelamin Responden.....	50
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia	51
Tabel V.3	Responden Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel V.4	Tanggapan Responden Mengenai Tempat Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Berjarak Minimal dari Pusat Kota Kecamatan 3 KM dan 500 M dari Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	56
Tabel V.5	Tanggapan Responden Mengenai Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Dilakukan Ditempat Penduduk Rendah Sampai Sedang	59
Tabel V.6	Tanggapan Responden Mengenai Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Dilakukan Dilokasi Lahan Terlantar dan Bukan Lahan Produktif	61
Tabel V.7	Tanggapan Responden Mengetahui Lokasi Prioritas Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Berada di Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan, dan Desa Kayu Ara Permai	65
Tabel V.8	Tanggapan Responden Mengenai Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Sudah Sesuai Dengan Lokasi Prioritas	66
Tabel V.9	Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Dari BLH Terhadap Pelarangan Penangkaran Walet Disekitar Kawasan Tempat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Yang Ada Di Kecamatan Sungai Apit	68

Tabel V.10	Tanggapan Responden Mengenai Sudah Mengurus Perizinan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	74
Tabel V.11	Tanggapan Responden Berapa Lamakah Jangka Waktu Perizinan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	76
Tabel V.12	Tanggapan Responden Biaya Mengurus Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet Sangat Mahal	77
Tabel V.13	Tanggapan Responden Berakhirnya Perizinan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Akan Mengurus Perizinan Lagi	78
Tabel V.14	Tanggapan Responden Mengenai Larangan Membunyikan Suara Pita Kaset Burung Walet Kecuali Pada Pukul 15 s/d 19.30 Wib, Apakah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak Sudah Pernah Mensosialisasikannya	83
Tabel V.15	Tanggapan Responden Dalam Membunyikan Suara Pita Kaset Burung Walet Melebihi 55 Desibel (db)	86
Tabel V.16	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet	88
Tabel V.17	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Lokasi Prioritas Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit	89
Tabel V.18	Rekapitulasi Jawaban Responden Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet	91
Tabel V.19	Rekapitulasi Jawaban Responden Suara Pita Kaset Burung Walet.....	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang obat-obatan, membuat masyarakat tertarik untuk melakukan peluang usaha dan terobosan bisnis dalam bidang obat-obatan, usaha yang disinyalir dan dianggap mudah serta dapat mendongkrak perekonomian yaitu usaha penangkaran burung walet karena tidak perlu memberi makan burung walet yang dibudidaya.

Burung walet tetap hidup di alam bebas sehingga burung walet mencari makan dialam bebas hanya saja tempat-tempat untuk bersarang yang disediakan oleh pengusaha penangkaran walet yaitu berupa bangunan gedung bertingkat yang dibuat sedemikian rupa sehingga burung walet mau berkembangbiak ditempat tersebut, setelah burung walet mau berkembangbiak banyak sarang burung walet yang ada dirumah walet itu sendiri, maka langkah selanjutnya yang diambil membiarkan hingga keturunan pertama kemudian pada keturunan kedua burung-burung walet, maka pengusaha dapat memanen sarang burung walet. Karena air liur burung walet yang diambil dari sarang burung walet dianggap dapat dibuat obat-obatan yang dapat menyembuhkan bermacam penyakit dan karena itulah sarang burung walet mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi hal inilah yang membuat masyarakat terdorong untuk melakukan usaha penangkaran sarang burung walet.

Dengan adanya penangkaran sarang burung walet masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak merasakan dampaknya, namun hal ini hanya didominasi kaum pemilik modal baik itu pembuatan rumah walet memerlukan cukup banyak modal. Namun ketertarikan ini juga didukung oleh banyaknya burung walet yang ada di alam bebas sehingga para pemilik modal menjadi semakin yakin akan keberhasilan usaha ini.

Burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tempat yang biasa di jadikan untuk berkembang biak burung walet telah dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam, perdagangan dan baik sektor pertanian ataupun sektor perkebunan dan dijadikan pula sebagai tempat pemukiman masyarakat setempat, sehingga burung walet itu sulit untuk mencari tempat untuk berkembangbiak sehingga sasaran yang dijadikan tempat untuk berkembangbiak adalah rumah-rumah penduduk yang strategis untuk ditempati, hal inilah yang membuat salah satu pemikiran untuk membuat rumah khusus untuk perkembangbiakan burung walet, Selain untuk melestarikan keberadaan burung walet juga untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan air liur yang ada disarang burung walet tersebut.

Pesatnya pengusahaan walet yang membangun tempat usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, membuat pemerintah daerah setempat untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah (PERDA), baik izin penangkaran, pajak, cara pengawasan dan letak yang berkaitan dengan tata kelola penangkaran burung walet yang ada di Kabupaten Siak.

Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, kemudian peraturan tersebut diperkuat dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana disebutkan diatas.

Dengan adanya peraturan daerah tersebut tidak menutup kemungkinan akan masih banyak penangkaran sarang burung walet yang belum mempunyai izin tempat usaha penangkaran, tetapi hanya mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja, sehingga kesempatan itu dijadikan sebagai penangkaran sarang burung walet yang menyalahi tata Kota, dan faktor ketertiban.

Pesatnya pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menjadi suatu masalah besar bagi ketentraman masyarakat Kecamatan Sungai Apit hari ini, Khususnya masyarakat Kelurahan Kecamatan Sungai Apit Walupun peraturan daerah telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sendiri, dan tujuannya adalah supaya penangkaran sarang burung walet tersebut bisa aman dan tidak melanggar aturan yang ada. karena mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya. untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu diatur pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang

burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Pengusahaan penangkaran sarang burung walet mempunyai potensi yang sangat strategis untuk dikembangkan, maka perlu adanya pengawasan penangkaran sarang burung walet oleh pemerintah daerah kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Siak pernah memungut pajak pengusahaan walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit hanya sebagian kecil saja, pada hal pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit sangat banyak sekali. Data pemungutan pajak pada Tahun 2010 pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data pemungutan pajak pada Tahun 2010 pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No	WP	Tanggal Setor	Nama usaha	Jumlah (Rp)
1	Go Se Tiam	30 Desember 2010	Penangkaran Walet	480.000.00
2	Adi Munardi	30 Desember 2010	Penangkaran Walet	2.400.000.00
3	Sani	30 Desember 2010	Penangkaran Walet	480.000.00
4	Kanghe	30 Desember 2010	Penangkaran Walet	600.000.00
5	Cikuang	30 Desember 2010	Penangkaran Walet	720.000.00
6	Robiah	30 Desember 2010	Penangkaran Walet	240.000.00
7	Ruslidiono	30Desember 2010	Penangkaran Walet	480.000.00
8	Oie Peng	31 Desember 2010	Penangkaran Walet	480.000.00
9	Aguan	31Desember 2010	Penangkaran Walet	600.000.00
10	Hokian	31 Desember 2010	Penangkaran Walet	720.000.00
11	Wijaya	31 Desember 2010	Penangkaran Walet	1.200.000.00
12	Aco	31 Desember 2010	Penangkaran Walet	480.000.00
13	Kusnan	31 Desember 2010	Penangkaran Walet	480.000.00
Jumlah				14,160,000.00

Sumber: Dispenda Kab.Siak Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten dalam melaksanakan pemungutan pajak terhadap pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tidak berjalan dengan baik, ini dikarenakan bagi pengusaha penangkaran walet tidak mempunyai izin sehingga para pengusaha walet tidak sadar telah melanggar aturan yang telah ada.

Maka dari itu, penulis melihat bahwasanya penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tidak sesuai dengan peraturan daerah contoh studi kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet, sebenarnya lokasi tersebut telah diatur oleh peraturan daerah. untuk lokasi Kecamatan Sungai Apit didalam peraturan daerah tersebut adalah berlokasi Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara Permai. Sedangkan kondisi dilapangan yang banyak terdapat penangkaran sarang burung walet di Kelurahan Sungai Apit. Padahal di Kelurahan Sungai Apit tersebut pemukiman masyarakat sangat padat dan di Kelurahan Sungai Apit termasuk kota bagi Kecamatan Sungai Apit.

Data pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak mempunyai izin hanya mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saja di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tabel I.2

Data pengusaha penangkaran sarang burung walet hanya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No	Nama pengusaha Walet	Alamat	Lokasi /Tempat
1	Go Se Tiam	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
2	Andi Munardi	Jln.Pasar	Kota Sungai Apit
3	Sani	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
4	Kusnan	Jln. Diponegoro	Kota Sungai Apit
5	Atan	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
6	Atan	Jln.Pasar	Kota Sungai Apit
7	Bakhtiar, SH	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
8	Kang He	Jln.Pasar	Kota Sungai Apit
9	Cikuang	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
10	Kimse	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
11	Aco	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
12	Ruslidono	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
13	Ruslidiono	Jln.Pasar	Kota Sungai Apit
14	Oie Peng	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
15	Ayu / Ase	Jln. Diponegoro	Kota Sungai Apit
16	Aco	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
17	Wijaya / hokti	Jln. Diponegoro	Kota Sungai Apit
18	Aguan	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
19	Juniar	Jln.Pasar	Kota Sungai Apit
20	Alo	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
21	Kinsan	Jln.Pasar	Kota Sungai Apit
22	Tancin	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
23	Hokian	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
24	Tjeng hwie	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
25	Cindra wijaya	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
26	Tan Ting Kwa	Jln.A.yani	Kota Sungai Apit
27	Cindra wijaya	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
28	Rosnelly	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
29	Tan ting kwa	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
30	Kian bian	Jln.Hangtuah	Kota Sungai Apit
31	Paijan	Jln. A. Yani	Kota Sungai Apit
32	Ateng	Jln. A. yani	Kota Sungai Apit
33	Awat	Jln. Hangtuah	Kota Sungai Apit

Sumber: Dispenda Kab.Siak Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak banyak terdapat di pusat kota kecamatan yaitu di Kelurahan Sungai Apit, Sedangkan dalam Peraturan Bupati (PERBUB) tentang penangkaran sarang burung walet dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 tentang kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet adalah:

1. Jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Kepadatan penduduk rendah sampai sedang dan
3. Lahan terlantar dan atau bukan lahan produktif.

Maka dari itu penulis sangat berminat sekali untuk melaksanakan penelitian tentang penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tersebut, kerna penulis melihat Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengawasi Penangkaran Sarang Burung Walet belum ada terutama pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) kurang melihat kondisi dilapangan, pada hal didalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak di dalam Bab VIII pasal 20 dan pasal 21 menjelaskan bahwasanya yang mengadakan pengawasan dan pengendalian penangkaran sarang burung walet tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Sedangkan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. pengawasan merupakan kegiatan untuk mencocokkan

hasil kerja dengan sasaran yang telah ditetapkan dan melakukan pengamatan, apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan merupakan bagian penting yang mesti diperhatikan mengingat kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan dengan kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (Power Maker), dalam kondisi demikian aspirasi masyarakat (Publik) sebagai pemegang kegiatan relatif terabaikan.

Mengingat pentingnya pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, negara ini telah menetapkan tentang kebijakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam suatu acuan baku berbentuk undang undang. Dalam undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan tegas dijelaskan bahwa indonesia memiliki lembaga pengawasan antara lain:

1. Lembaga pengawasan administratif.
2. Lembaga pengawasan politis.
3. Lembaga pengawasan ombudsman.
4. Lembaga pengawasan yudikatif.

Berkaitan dengan judul skripsi penulis mengenai “***Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).***” maka penulisan skripsi ini akan berfokus pada pengawasannya, yang mana pengawasan penangkaran walet ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan penelitian ini adalah “ *Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pengawasan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun harapan Penulis, yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna Teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara pada umumnya, dan inventaris ilmu penelitian dibidang sistem pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Guna Akademis, hasil penelitian ini juga di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
3. Guna Praktis, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak pada umumnya dan Kecamatan Sungai Apit pada khususnya dalam pelaksanaan pengawasan penangkaran burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak secara maksimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti antara lain Pengertian Peranan, Pemerintah Daerah, Pengawasan, Kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten dalam mengontrol penangkaran sarang burung walet, Konsep Operasional, hipotesa dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel dan Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi Georafis Dan Monografi Kecamatan Sungai Apit, Sejarah Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Apit, Sejarah BLH Kabupaten Siak, Kewenangan serta tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Siak, serta Visi Misi BLH Kabupaten Siak.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan di sajikan beberapa defenisi tentang kata peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peranan adalah *pertama*, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. *Kedua*, peran adalah karena ia mengatur prilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain. *Ketiga*, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10) peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal peristiwa.

2.2. Pemerintahan Daerah

Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari sabang sampai merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota kecil, dengan rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragamnya sosial budaya. Maka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya diamandemen menegaskan sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang dasar 1945 tersebut yang menetapkan bahwa bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan berdasarkan undang-undang sistem pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah berapa kali pemerintah membentuk undang-undang tentang

pemerintahan daerah, dimana setiap perubahan-perubahan terhadap ketentuan pemerintahan daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat, sehingga lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan digambarkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan hak otonom bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri.

Sesuai dengan ketentuan amandemen undang-undang dasar 1945 tersebut diatas, kemudian Manan (2001:59) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan rumah tangga daerah tersebut adalah:

1. Harus menjamin ke ikut sertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bidang pengaturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
2. Pada dasarnya urusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi pemerintahan daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.
3. Sebagai konsekuensinya dari butir (b) di atas, maka sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.

4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campur tangan pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.

Sistem rumah tangga daerah harus ditunjukan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain urusan rumah tangga daerah harus terutama ada bidang pelayanan kepentingan umum, ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru. Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini karena ruang lingkupnya yang hanya sebatas daerah jurisdiksinya.

Pemerintah Daerah adalah sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Amandemen undang-undang dasar 1945.

Sistem rumah tangga daerah harus ditunjukan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain urusan rumah tangga daerah harus terutama ada bidang pelayanan kepentingan umum, ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru. Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini karena ruang lingkupnya yang hanya sebatas daerah yurisdiksinya.

Pada saat ini, pemerintah kota maupun desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini diatur pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

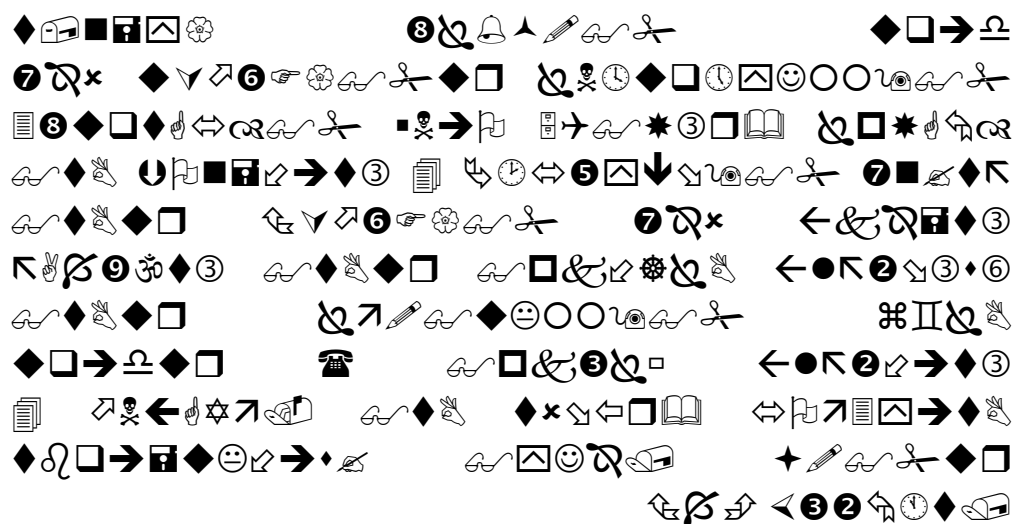
2.3. Pengawasan

Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu proses yang menggerakkan kearah sasaran yang hendak dicapai. Proses pergerakan ini lazim disebut dengan proses manajemen, dimana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara-cara pemikiran untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerjasama dengan orang-orang sebagai tenaga kerja. Serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat-tepatnya. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada

bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, mengemudi organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 1994:81)

Menurut S.P Siagian (2000:47) pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah yang tercantum dalam dilaksanakan dengan baik atau tidak.

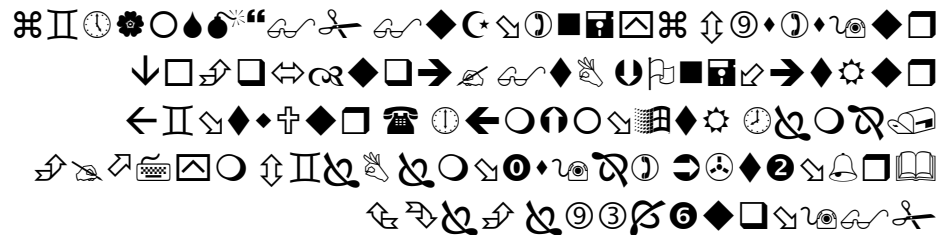
Didalam islam pengawasan itu sangat penting, sepertimana yang tercantum dalam Ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Hadid 57: 4



Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit

dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya dalam surat Qaff 50:16 sebagai berikut:



Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,

Kartini Kartono (1994:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut.

Siagian (2003:112) menyatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang di serahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat di berikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan

indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam mengukur variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Standar pelaksanaan. Standar-standar pengawasan dalam rangka ini dimaksudkan sebagai suatu pengaturan yang dapat digunakan sebagai patokan bagi pegawai dalam memulai pekerjaan yang diawasi.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam tiap hari.
- c. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar dan menganalisa penyimpangan. Artinya membandingkan antara konsep dan implementasi tentang kegiatan pengawasan.
- d. Pengambilan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartini Kartono, 1994:153).

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada informasi yang diterima (Nanang Fattah, 2004:102).

Pengawasan dilihat dan waktunya yaitu :

- a. Pengawasan prevektif (pencegahan) adalah pengawasan yang dilakukan sebelumnya, agar suatu kegiatan atau pekerjaan tidak terjadi penyimpangan.
- b. Pengawasan represif (pemeriksaan) adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu pekerjaan dilakukan, tujuannya apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan maka diharapkan setelah pemeriksaan itu, kesalahan atau penyimpangan serupa tidak akan terulang lagi.
- c. Pengawasan disaat terjadi proses pengawasan. Pelaksanaan pengawasan ini lebih cenderung disebut sebagai pemeriksaan atau pengendalian seketika.
- d. Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan secara priodik, misalnya semiggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali.
- e. Melakukan pengawasan atau pemeriksaan mendadak, Hal ini agar mereka selalu siap kepada pekerjaannya dan ditunjukkan sebagai pengawasan prevektif, sehingga penyimpangan dapat diketahui lebih dini dan dapat diperbaiki sesegera mungkin (Sudirman,1994:93-94).

Menurut Kansil (2000:12-14) pengawasan ini sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan terencananya pembangunan pada umumnya, dalam organisasi pemerintahan pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi :

1. Pengawasan umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati , walikota madya, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
2. Pengawasan prevektif. Dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
3. Pengawasan refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

2.4. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Mengontrol Penangkaran Sarang Burung Walet

Apabila dilihat secara harfiah ilmu kebijakan publik terjemahan dari kata “Policy Science”. Tokoh atau penulis kebijakan publik adalah “Willian

Dunn, Charles Jones, Lee Friedman” mereka menggunakan kata “public policy, public dan policy Analisis” dengan pengertian yang berbeda.

Dunn, (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah Serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Di Indonesia menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan” dari terjemahan policy yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalkan dengan pengertian “PUBLIC” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan, yang membedakan istilah “policy” sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “discretion” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistik untuk satu hal.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “Negara Kota”. Dalam bahasa latin yaitu politik atau Negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai policie

yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn,2003:27).

Dilihat dari defenisi kebijakan yang dikemukakan oleh Abdul Latief (2005: 88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu, prilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Lebih lanjut Nyimas Dwi koryati (2005:7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Selanjutnya dapat dilihat konsep analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Quede dalam Dunn (2003:45) bahwa analisa kebijaksanaan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa control secara harfiah dapat diartikan “Pengawasan”. Effendy (2003:116) mengemukakan bahwa control adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan dengan masukan yang ada atau dikeluarkan yang dihasilkan.

Jika diteliti menurut prosesnya, maka control itu terdiri dari kegiatan :

- a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.

- b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta adalah perbandingan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan standar, tetapi juga dinilai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standard dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.
- d. Tindakan korektif terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standard dan rencana yang telah ditentukan. (Effendi, 2003 : 116)

Luther gulick dan L.Urwick dalam Ndraha (2000:12) mengemukakan bahwa Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung dibawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Keempat prinsip itu adalah:

- 1. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua factor didalam suatu situasi.

2. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan.
3. Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan.
4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Proses pengawasan terdiri dari tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan managerial. Langkah-langkah pokok ini menurut George.R. Terry dalam Sarwoto (2002 :100) meliputi :

- a. Penentuan ukuran atau pedoman buku (standar)
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan.
- c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman buku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan teknik pengawasan menurut Sarwoto (2002:103) menjelaskan ada dua yaitu:

1. Pengawasan langsung dapat berbentuk inspeksi langsung observasi, dan laporan ditempat.
2. Pengawasan tidak langsung dapat berbentuk laporan tertulis dan lisan.

Sebuah kebijakan tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “Evaluasi

Kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konsetuennya, sejauhmana tujuan telah dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “Harapan” dengan “Kenyataan” yang terjadi dilapangan.

Agar suatu peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten dapat dilaksanakan dengan baik dibutuhkan koordinasi antar instansi terkait. Koordinasi adalah proses pengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional). Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi (T. Hani Handoko, 19985).

2.5. Konsep operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka di operasionalkan beberapa konsep yang dipakai:

1. Kriteria lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet adalah mengatur tentang jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, kepadatan penduduk rendah sampai sedang dan lahan terlantar dan atau bukan lahan produktif.(Perbub,2010:26-2).
2. Lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet adalah mengatur tentang RTRW penangkaran sarang burung walet yang mana prioritas lokasi penangkarannya di Kecamatan Sungai Apit yaitu

Berlokasikan, Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara Permai.

3. Perizinan penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran burung walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 yang mana dalam peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin pengusaha penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).
4. Sedangkan suara pita kaset burung walet adalah tata cara dalam melaksanakan membunyikan Suara Pita Kaset Burung Walet yang mana dalam membunyikan suara pita tersebut harus membunyikan suara pita burung walet mulai dari pukul 15.00 Wib sampai dengan 19.30 Wib.(Perbub,2010:26-11).

2.6. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka hipotesanya sebagai berikut: "Diduga Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih lemah karena kurangnya pengawasan secara langsung oleh instansi terkait".

2.7. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian adalah Pengawasannya, dengan sub variabel dan indikator sebagai berikut:

1. Kriteria lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet
 - a. jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M Dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. Kepadatan penduduk rendah sampai sedang.
 - c. Lahan terlantar dan bukan lahan produktif.
2. Lokasi Prioritas Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit
 - a. Penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Berlokasikan, Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara Permai.
 - b. Pusat Kota Kecamatan Sungai Apit tidak termasuk daerah penangkaran walet.
3. Perizinan Penangkaran Walet
 - b. Persyaratan pengajuan permohonan.
 - c. Jangka waktu perizinan.
 - d. Biaya perizinan.
 - e. Berakhirnya perizinan.
4. Suara Pita Kaset Burung Walet

- a. Dilarang membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15.00 s/d 19.30 Wib.
- b. Dilarang membunyikan suara pita kaset melebihi 55 desibel (db)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama (data penelitian) yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpul dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. lokasi penelitian adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak dan Pengusaha Penangkaran Walet.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian (lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pertanyaan) dokumen dan observasi.

2. Data skunder, yaitu data kelompok yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan, arsip maupun keterangan lainnya yang meliputi:
 - a. Letak tata ruang bangunan penangkaran sarang burung walet Kecamatan Sungai Apit sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008.
 - b. Pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak mempunyai izin dan maupun mempunyai izin penangkaran sarang burung walet.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primier dan data sekunder yang tidak ditemukan dalam angket, melalui dialog langsung dengan responden terpilih secara terpimpin dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2. Angket atau Quesioner, yaitu aktipitas yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternative jawaban yang telah di sediakan.

3. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

3.5. Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) 19 orang, pengusaha penangkaran sarang burung walet 33 orang dan *Key Informan* atau Informasi Kunci sebanyak 7 orang.

3.5.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian.

Untuk teknik pengambilan sampel dari Pegawai BLH Kabupaten Siak adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni di ambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pegawai BLH Kabupaten Siak yang dijadikan sampel adalah 3 orang yang terdiri dari Kepala BLH, Sekretaris BLH, Kasubbid pengawasan dan pengendalian BLH.

Adapun teknik pengambilan sampel dari Pengusaha penangkaran sarang burung walet Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menggunakan teknik *Sensus*, yaitu keseluruhan populasi dari pengusaha penangkaran sarang burung walet diambil semuanya sebagai sampel.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari *Key Informan* adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni di ambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. *Key Informan* dijadikan sampel adalah 7 orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Politik, Ketua Asosiasi Pengusaha Walet Kecamatan Sungai Apit, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), dan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah Populasi dan Sampel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Penetapan populasi dan sampel penelitian

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Pegawai BLH Kab. Siak.	19	3
2	Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.	33	33
3	Key Informan atau Informasi Kunci	7	7
Jumlah		59	43

Sumber : Data Olahan 2011

3.6. Analisis Data

Analisis data penulis menganalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, kemudian penulis akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.Kondisi Geografis Dan Monografi Kecamatan Sungai Apit

4.1.1.Sejarah Kecamatan

Menurut kisah di zaman bahari adalah sepasang suami istri yang berasal dari kampung *Buruk Bakul* melakukan sebuah petualangan dengan sebuah kampung kecil menyusuri pantai timur Sumatra. Si suami bernama Pak Mattuwid berusia kurang lebih Enam Puluh Tahun dan istrinya bernama Mak Iyuk berusia sekitar Lima Puluh Tahun, mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat menyambung yang baru. Kampung mereka beberapa tahun terakhir telah digenangi air laut akibat pasang naik musiman, yaitu musim angin utara yang membawa arus Selat Melaka melalui Selat Bengkalis.

Sebagai petani di pinggir sungai kecil itu sebagai penduduk kampung Teluk Batil yang mulanya bekerja sebagai penangkap udang, kini tertarik dengan usaha sebagai membuka hutan. Sebagian mereka akhirnya dengan persetujuan Pak Mattuwid ikut pula membuka hutan disekitar sungai untuk bercocok tanam. Kini Pak Mattuwid tidak sendiri lagi mengadu untung sebagai petani, sehingga pinggiran sungai yang ditumbuhi hutan belukar itu telah menjelma sebagai kampung kecil. Kesuburan daerah peladangan baru tersebut terbau pula oleh petani dari kampung-kampung sekitar sungai siak lainnya, sehingga mengundang petani-petani itu bergabung dengan

kelompok Mattuwid, seperti Pak Endan, Pak Mustofa dan lain-lain yang datang dari Pebadaran, Benayah dan lain-lain.

Waktu terus berjalan dari musim kemusim, pinggiran sungai kecil ini semakin ramai penghuninya sehingga merupakan perkampungan baru yang telah dikenal orang. kampung baru yang belum bernama ini secara kebetulan telah terbiasa orang menyebut sungai sempit dan kemudian berubah sebutannya menjadi Sungai Apit karena sungai ini sempit dan diapit oleh semak belukar yang ternyata dikiri kanannya mengandung tanah yang subur.

Kampung Sungai Apit yang mulanya merupakan tempat perhatian pertualangan suami istri dari Kampung Buruk semakin hari semakin meluas, sehingga menarik perhatian dari luar daerah seperti kedatangan Pak Ahmad dan kawan-kawannya dari Bangkinang yang pada waktu itu bekerja sebagai penakik getah dikampung lalang mereka datang menemui Pak mattuwid sebagai sesepuh kampung Sungai Apit untuk minta izin membuka lahan pertanian. Atas kesepakatan bersama Pak Ahmad dan Kawan-kawannyapun merintis hutan arah ketimur sebagai perluasan Pak Ahmad dari bengkinang ini sampai sekarang telah menjadi pemukiman penduduk yang Merupakan bagian wilayah Kelurahan Sungai disebut Kampung Rintis Sungai Apit.

Sebagaimana diceritakan terdahulu bahwa sungai kecil yang sempit dan diapit oleh tanah yang subur itu, kini hampir tidak kelihatan lagi airnya karena akibat dibukanya lahan pertanian dengan parit-paritnya sehingga secara alami telah mendangkal dengan sendirinya.

Sungai Kecil atau Sungai Apit kini hanya merupakan dataran rendah yang melintas Ibukota Kecamatan Sungai Apit tepatnya melintas dari lokasi PLN, SMP Negeri 1 dan terus disamping kantor Camat dan melewati belakang MESS Kecamatan langsung Kemuaranya yang berjarak kurang lebih 200 Meter dari Pelabuhan LASDAP. itulah sejarah singkat tentang asal nama Kelurahan Sungai Apit yang sekaligus sebagai Ibukota kecamatan Sungai Apit sekarang.

Kecamatan Sungai Apit merupakan kecamatan tertua di Kabupaten Siak yang diresmikan pada tanggal 18 September 1977. Kecamatan Sungai Apit ini terletak 43 KM dari Ibukota Kabupaten Siak dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan darat, atau sekitar 1 jam perjalan menyusuri Sungai Siak kearah muara.

Kecamatan Sungai Apit sudah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, Sungai Apit merupakan salah satu kecamatan dibawah naungan Kabupaten Bengkalis. Sebagai kecamatan yang terletak dimuara Sungai Siak dan tepian Selat Panjang, Sungai Apit merupakan jalur ramai penghubung antara Bengkalis, Pekanbaru, Batam, dan Tanjung Pinang serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Selat Melaka melalui Pelabuhan Buton.

4.1.2. Keadaan Alam

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu Kecamatan yang teerdapat diKabupaten Siak Propinsi Riau, tinggi Pusat pemerintahan Wilayah Kecamatan Dari permukaan laut adalah 2 meter dengan suhu minimum 21

0Cdan maksimum 28 OC dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm/tahun, geografi dan bentuk wilayah kecamatan Sungai Apit 100 % datar sampai berombak. Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 13 Desa dan 1 Kelurahan dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 219.995 Ha kepadatan penduduk rata-rata Jiwa/KM2. Jarak Ibu kota Kecamatan dengan desa terjauh adalah 117 KM dan dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan sungai selama 6 Jam sedangkan jarak Ibu kota Kecamatan dengan Ibu kota Kabupaten adalah 60 KM melalaui jalan darat.

4.1.3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Sungai Apit dirinci Menurut Desa/Kelurahan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Luas wilayah Kecamatan Sungai Apit
berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2009

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Kelurahan Sungai Apit	10.093
2	Teluk Lanus	55.000
3	Tanjung Kuras	12.950
4	Parit I/II	10.000
5	Teluk Masjid	5.030
6	Sungai Kayu Ara	12.386
7	Lalang	9.064
8	Mengkapan	11.327
9	Sungai Rawa	41.543
10	Penyengat	43.732
11	Harapan	1.670
12	Teluk Batil	1.050
13	Bunsur	6.150
Jumlah		219.995

Sumber : Kantor Kecamatan Sungai Apit

4.1.4. Batas-Batas Wilayah

Wilayah Kecamatan Sungai Apit berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2001 masing-masing berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat : Kec. Bungaraya, Kec. Sabak Auh, Kab. Bengkalis.
- b. Sebelah timur : Kec. Tebing Tinggi, Selat Panjang, Kab. Bengkalis.
- c. Sebelah utara : Kec. Sabak Auh, dan Selat Panjang.
- d. Sebelah selatan: Kab. Pelalawan.

4.1.5. Jumlah Penduduk

Kecamatan Sungai Apit mempunyai jumlah penduduknya sebesar 21.854 Jiwa yang terdiri dari 90% atau sekitar 19.670 Jiwa Suku Melayu, 5% Suku Keturunan Tionghoa atau sekitar 1.092 Jiwa dan sekitar 2% Suku Jawa atau sekitar 437 Jiwa, 2% Suku Batak atau sekitar 437 Jiwa, dan 1% Suku Minang atau sekitar 218 Jiwa. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Apit
berdasarkan suku-suku yang ada Tahun 2009.

No	Suku	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Melayu	19.670	90%
2	Tionghoa	1.092	5%
3	Jawa	437	2%
4	Batak	437	2%
5	Minang	218	1%
Jumlah		21854	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Sungai Apit

4.2. Sejarah Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Apit

Usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit sudah dimulai sejak Tahun 2005, ketika itu Kecamatan Sungai Apit baru memulai pembangunan pasca kebakaran yang terjadi dipasar Sungai Apit pada Tahun 2002. Kebakaran yang terjadi pada Tahun 2002 tersebut telah menghancurkan hampir semua yang ada didalam Pasar Sungai Apit.

Penangkaran sarang burung walet di kecamatan Sungai Apit pada mulanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat keturunan Tionghoa yang mata pencahariannya sebagai pedagang, mereka memanfaatkan ruko lantai atas yang tidak digunakan untuk tempat penangkaran sarang burung walet.

Pada awalnya bangunan-bangunan ruko yang ada didalam Pasar Sungai Apit adalah milik sebagian besar penduduk asli Kecamatan Sungai Apit yaitu masyarakat Suku Melayu. Masyarakat keturunan Tionghoa hanya memiliki beberapa ruko didalam pasar tersebut. Namun setelah kejadian kebakaran, banyak masyarakat keturunan Melayu yang memutuskan untuk menjual tempat usahanya didalam Pasar Sungai Apit kepada masyarakat keturunan Tionghoa. Hal ini dilakukan karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki asuransi, sehingga pada saat terjadi kebakaran semua harta benda ikut terbakar dan yang bertahan hanya sebagian kecil yang memiliki asuransi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa untuk membangun kembali ruko-ruko didalam Pasar Sungai Apit. Ruko-ruko tersebut pada awalnya merupakan tempat usaha penjualan barang-barang

kebutuhan harian sampai barang-barang mewah milik masyarakat keturunan Tionghoa.

Namun sejak Tahun 2005 usaha penangkaran sarang burung walet mulai berkembang di wilayah Kabupaten Siak termasuk Kecamatan Sungai Apit, sehingga masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Kecamatan Sungai Apit berlomba-lomba untuk melakukan usaha penangkaran sarang burung walet.

Seiring dengan berjalannya waktu, usaha penangkaran sarang burung walet ini semakin berkembang, penangkaran sarang burung walet tersebut hampir seluruhnya berada dalam Pasar Sungai Apit dan diantara rumah-rumah penduduk. Ruko-ruko berlantai dua sampai empat milik pengusaha kaum keturunan Tionghoa yang ada didalam area Pasar Sungai Apit berubah menjadi tempat penangkaran walet.

Oleh karena itu, maka pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak membuat Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin penangkaran sarang burung walet yang bertujuan untuk menertibkan usaha Sarang Burung Walet yang sudah ada yang akan dibangun didalam wilayah Kabupaten Siak.

4.3. Keberadaan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak

4.3.1. Sejarah BLH

Sejalan dengan berdirinya Kabupaten Siak maka diperlukan perkembangan kedepan, oleh karena itu pemerintah daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah lingkungan hidup salah satunya juga

terhadap penangkaran sarang burung walet yaitu Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan (BLH). Kegiatan pengawasan di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah terhadap pengawasan penangkaran burung walet sebagai perwujudan kegiatannya.

4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi BLH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi BLH Kabupaten Siak adalah membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. untuk menyelenggarakan tugas tersebut BLH Kabupaten Siak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penataan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Penetapan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS).
- c. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- d. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL.
- e. Penyelenggaraan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca.
- f. Pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan.
- g. Pengembangan dan instrumen lingkungan hidup.
- h. Fasilitas penyelesaian sengketa.

- i. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.
- k. Pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- l. Pengelolaan informasi lingkungan hidup.
- m. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup.
- n. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Penghargaan.
- o. Penertiban izin lingkungan, Penegakan hukum lingkungan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4.3.3. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok BLH Kabupaten Siak mempunyai susunan terdiri dari:

a. Kepala Badan

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan baik fungsi koordinasi maupun pengawasan, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala badan mempunyai fungsi perumusan dan penataan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan lainnya.

b. Sekretariat

Sekretariat badan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan.

c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan melalui sekretaris dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Mempunyai fungsi dalam mengadakan pengawasan

terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup seluruh jenis usaha yang dilakukan bagi pengusaha.

d. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan

Bidang analisa pencegahan dampak lingkungan mempunyai tugas membantu kepala badan melalui sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan dampak lingkungan hidup, mempunyai fungsi menyiapkan analisa-analisa pencegahan dampak lingkungan.

e. Bidang Penegendalian Lingkungan

Mempunyai tugas membantu kepala badan melalui sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian lingkungan hidup, mempunyai fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah cair, padat, gas dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke media lingkungan, penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kerusakan hutan dan lahan akibat biomassa, illegal logging, kebakaran hutan, kerusakan pesisir dan laut kerusakan akibat bencana alam, banjir, longsor, dan abrasi. Bidang pengendalian ini mempunyai sub bidang pencemaran lingkungan hidup dan sub bidang kerusakan lingkungan hidup.

f. Bidang Pemantauan Lingkungan

Mempunyai tugas membantu kepala badan melalui sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pemantauan lingkungan. Mempunyai fungsi mengadakan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan alam.

4.3.4. Visi dan Misi BLH

Visi Bapedalda Kabupaten Siak adalah ***“Terciptanya Sadar Lingkungan Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Dalam Pengelola Serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan”***.

Sedangkan Misinya adalah:

1. Memanfaatkan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta dikelola dengan memelihara kelestarian fungsi dan keseimbangan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup melalui berbagai media penerangan dan pendidikan.
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pengelolaan Sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Melaksanakan konservasi dan pengelolaan kawasan cagar budaya dan cagar alam untuk melindungi keberlangsungan dan keanekaragaman ekosistem, terutama keanekaragaman hayati dan plasma nuftah.

5. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
6. Meningkatkan upaya penelitian terhadap potensi dan sistem Pengelolaan Lingkungan hidup melalui kerjasama antar disiplin dan antar lembaga.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

5.1.1. Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1
Jenis kelamin responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	26	78.79 %
2.	Perempuan	7	21.21 %
JUMLAH		33	100 %

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 33 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 27 responden laki-laki atau 78.79%, sedangkan responden perempuan sebanyak 7 responden atau 21.21%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel adalah 33 orang.

5.1.2. Responden Menurut Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semakin tinggi tingkat usia semakin baik karena tingkat kematangan emosi seseorang dalam berfikir. Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya. karena itu tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan tingkat usia responden dapat dilihat dalam tabel V.2 di bawah ini:

Tabel V.2
Identitas responden berdasarkan tingkat usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	20 – 25	3	9.09%
2	26 – 30	9	27.27%
3	31 – 35	10	30.30%
4	36 – 40	6	18.18%
5	41 – 45	3	9.09%
6	46 – 50	2	6.07%
	Jumlah	33	100%

Sumber : Data olahan 2011

Dari tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah berumur 31 - 35 tahun sebanyak 10 orang, sedangkan yang paling sedikit yaitu antara umur 46 – 50 tahun sebanyak 2 orang. Jadi dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia

30 tahun ke atas, dan dapat diasumsikan tidak ada masalah dalam kualitas dan produktivitas kerja.

5.1.3. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagai dasar pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian maka penulis terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden. Dapat dilihat pada tabel V.3 di bawah ini:

Tabel V.3
Responden menurut tingkat pendidikan

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase%
1	Strata 2	2	6.07%
2	Strata 1	7	21.21%
3	Diploma 3	1	3.03%
4	Sekolah Menengah Atas	23	69.69%
	Jumlah	33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.3. di atas, dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 23 orang sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat Akademi/Diploma sebanyak 1 orang responden, Maka dapat diakumulasikan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih dominan, artinya lebih banyak yang mengetahui dan menyadari pentingnya untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 04 Tahun 2008 tentang izin penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

5.2.Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya roda pemerintahan dengan baik. Penduduk sebagai bagian dari berdirinya suatu pemerintahan akan lebih cenderung menciptakan kerjasama dan hubungan baik. sedangkan pemerintah dari tugas dan kewajibannya bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan yang dapat menguntungkan keuntungan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah. karena hal ini dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat yang lebih ditingkatkan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu proses yang menggerakkan kearah sasaran yang hendak dicapai. Proses pergerakan ini lazim disebut dengan proses manajemen, dimana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara-cara pemikiran untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerjasama dengan orang-orang sebagai tenaga kerja. Serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun,

membimbing, memotivasi, mengemudi organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan.

Peran dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan daerah pada otonomi daerah saat ini, Kabupaten Siak telah melaksanakan beberapa usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan rakyat yang diantaranya adalah peraturan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin penangkaran sarang burung walet.

Dasar pertimbangan dalam kewenangan pemeberian izin pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu setiap pengusaha yang telah melakukan kegiatan pengusahaan penangkaran sarang burung walet baik dihabitat alami atau diluar habitat alami sebelum terbitnya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pengusahaan penangkaran sarang burung walet baik dihabitat alami atau diluar habitat alami setelah diterbitkannya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan tata ruang Kabupaten Siak, pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan, Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah pejabat yang menangani tentang pengelolaan lingkungan hidup, untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Pasal 20 s/d Pasal 22 tentang pengawasan dan pengendalian, setiap

permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh pejabat/ Tim yang ditetapkan dan dibentuk oleh bupati.

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak, dalam pelaksanaan pengusahaan penangkaran sarang burung walet ini memiliki banyak permasalahan yaitu masih banyak pengusaha walet yang belum Memiliki Izin, melanggar tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas maupun larangan membunyi suara pita kaset pada waktu yang telah ditetapkan padahal Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Bupati (PERBUB) sudah 3 Tahun disahkan.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Mengawasi Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) ditetapkan beberapa indikator yang relevan, yang pembahasannya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

5.3.Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet

Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet adalah mengatur tentang jarak minimal dari Pusat Kota Kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, kepadatan penduduk rendah sampai sedang dan lahan terlantar dan atau bukan lahan produktif.

Kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 04 Tahun 2008 dan diperkuat dalam Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010, didalam peraturan daerah tersebut tidak

diperbolehkan mengadakan penangkaran sarang burung walet selain lokasi yang telah diatur peraturan daerah dan peraturan bupati siak.

Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Apit) tentang Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet berdasarkan indikatornya yaitu :

5.3.1. Jarak minimal dari pusat kota kecamatan dari 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Jarak minimal penangkaran sarang burung walet harus berjarak dari pusat kota kecamatan dari 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan tujuan supaya tidak mengganggu ketentraman bagi warga masyarakat disekelilingnya, jarak penangkaran sarang burung walet sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 dan diperkuat dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 4
Tanggapan Responden mengenai tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	8	24.2 %
2	Tidak	22	67.6 %
3	Tidak Tahu	3	9.1%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.4 di atas tanggapan responden mengenai tempat pengusaha penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, dimana yang menjawab Ya sebanyak 8 orang dengan persentase (24.2%), yang menjawab Tidak 22 dengan persentase (67.6%), sedangkan yang menjawab Tidak Tahu 3 dengan persentase (9.1%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat bahwa pengusaha penangkaran sarang burung walet berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak berada di daerah kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat penelitian, bahwasanya penangkaran sarang burung walet yang ada di kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memang tidak berada di daerah kriteria lokasi, banyak para pengusaha sarang burung walet mengadakan penangkarannya di daerah pemukiman masyarakat, kota kecamatan (Pasar Sungai Apit), fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, dapat dianalisa bahwa peranan pemerintah daerah kabupaten dalam mengawasi kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet harus berjarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial tidak berjalan dengan baik ini dibuktikan masih banyak para pengusaha walet yang mengadakan penangkaran sarang burung walet di daerah pusat kota kecamatan dan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Analisa ini didukung oleh pendapat Tokoh

Adat masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Apit yaitu Bapak Yuliaswandari, dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Yuliaswandari pada Tanggal 13 Desember 2011, beliau mengatakan:

“Banyak para pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit tidak pada tempatnya, coba aja lihat sekarang banyak pengusaha walet mengadakan penangkaran didaerah pusat kota kecamatan dan terdapat juga fasilitas sosial dan fasilitas umum ini sangat mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya, memang tidak ada niat langsung pihak pemerintah daerah baik dari BLH Kabupaten Siak untuk menertibkan kembali penangkaran walet yang ada dipusat Kota Kecamatan Sungai Apit ini, heranlah kami melihatnya”.

5.3.2. Kepadatan Penduduk Rendah Sampai Sedang

Lokasi penangkaran sarang burung walet ditempatkan dikepadatan penduduk rendah sampai sedang, maksudnya adalah hanya dibolehkan dalam penangkaran sarang burung walet hanya kepadatan penduduk rendah sampai sedang, bukan ditempat kependudukannya ramai dan dipenuhi dengan permukiman masyarakat, sehingga bagi pengusaha penangkaran sarang burung walet mengadakan penangkaran ditempat penduduk rendah sampai sedang secara otomatis tidak akan mengganggu lingkungan sekitarnya, tetapi para pengusaha walet melakukan penangkaran sarang burung walet ditempat penduduk yang padat dan penuh dengan pemukiman masyarakat maka secara otomatis akan mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya.

Untuk melihat Apakah pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan ditempat penduduk rendah sampai sedang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 5.
Tanggapan responden mengenai pengusahaan
penangkaran sarang burung walet dilakukan ditempat penduduk rendah
sampai sedang.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	15	45.4 %
2	Tidak	17	51.6 %
3	Tidak Tahu	1	3.0%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.5 di atas tanggapan responden mengenai pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan ditempat penduduk rendah sampai sedang, dimana yang menjawab Ya sebanyak 15 orang dengan persentase (45.4%), yang menjawab Tidak 17 dengan persentase (51.6%), sedangkan yang menjawab Tidak Tahu 1 dengan persentase (3.0%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat bahwa pengusahaan penangkaran sarang burung walet tidak berada ditempat penduduk rendah sampai sedang.

Berdasarkan pengamatan penulis ditempat penelitian, pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan ditempat penduduk rendah sampai sedang banyak tidak dilakukan oleh para pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit, padahal bagi para pengusaha walet harus mentaati peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang kriteria lokasi mengenai penangkaran sarang burung walet dilakukan

ditempat penduduk rendah sampai sedang, ini disebabkan banyaknya para pengusaha walet yang tidak mengerti yang mana daerah penduduk rendah sampai sedang, jadi, banyak pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang telah melanggar aturan yang telah ada.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, dapat dianalisa bahwa peranan pemerintah daerah kabupaten dalam mengawasi kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet dilakukan penangkaran ditempat penduduk rendah sampai sedang tidak berjalan dengan baik ini dibuktikan masih banyak para pengusaha walet yang mengadakan penangkaran sarang burung walet didaerah pemukiman masyarakat yang penduduknya ramai dan sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Analisa ini didukung oleh pendapat Tokoh Agama masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Apit yaitu Bapak Yasir Arafat S.ag dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Yasir Arafat S.ag pada Tanggal 13 Desember 2011, beliau mengatakan:

“pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit hari ini memang sudah keterlaluan, banyak pengusaha sarang burung walet yang membangun ruko untuk penangkaran sarang burung walet padat dengan perumahan masyarakat, pada hal kalau kita lihat dari segi dampak lingkungannya sangat berbahaya sekali salah satu contoh masyarakat di Kecamatan Sungai Apit ini masih banyak mengkonsumsi air hujan dari hasil tampungan dari atap rumahnya pada hal burung-burung walet itu berkeliaran diatas atap rumah penduduk disini dan itupun burung-burung tersebut mengeluarkan beraknya diatas atap rumah warga, inikan sudah keterlaluan padahal air ditampung masyarakat untuk diminum untuk kebutuhan sehari-hari, kami berharap pemerintah daerah kabupaten lebih tegas untuk bisa menanggapi pengusaha-pengusaha walet yang telah mengadakan penangkaran walet dekat dengan perumahan masyarakat, kalau bisa jangan ada lagi walet didaerah pemukiman masyarakat”.

5.3.3. Lahan Terlantar dan Bukan Lahan Produktif

Penangkaran sarang burung walet harus melakukan penangkarannya didaerah lahan terlantar bukan lahan produktif, karena kalau lahan produktif yang digunakan untuk penangkaran sarang burung walet akan mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya, ini disebabkan banyaknya pemukiman masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Apakah pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilakukan dilokasi lahan terlantar dan bukan lahan produktif maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 6
Tanggapan responden mengenai pengusahaan Penangkaran burung walet dilakukan dilokasi lahan terlantar dan bukan lahan produktif.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	7	21.2 %
2	Tidak	24	72.7 %
3	Tidak Tahu	2	6.1%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel V.6 di atas tanggapan responden mengenai pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilokasi lahan terlantar dan bukan lahan produktif, dimana yang menjawab Ya sebanyak 7 orang dengan persentase (21.2%), yang menjawab Tidak 24 dengan persentase (72.7%), sedangkan yang menjawab Tidak Tahu 2 dengan persentase (6.1%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat bahwa pengusahaan penangkaran sarang burung walet tidak dilakukan pengusahaan penangkarannya dilahan terlantar, tetapi, banyak yang melakukan penangkaran sarang burung walet dilahan produktif.

Berdasarkan pengamatan penulis ditempat penelitian, banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet melakukan penangkaran sarang burung walet dilokasi lahan produktif dan bukan lahan terlantar, ini sudah melanggar kriteria lokasi dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010 tentang kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet. seharusnya bagi pengusaha walet harus mentaati peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang kriteria lokasi mengenai penangkaran sarang burung walet dilakukan dilokasi lahan terlantar dan bukan lahan produktif, ini disebabkan banyaknya para pengusaha walet yang tidak mengerti yang mana lokasi lahan terlantar dan bukan lahan produktif, jadi, banyak pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang telah melanggar aturan yang telah ada.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet tentang lokasi lahan terlantar dan bukan lahan produktif yang ada di Kecamatan Sungai Apit tersebut. Berikut adalah kutipan langsung dari Bapak H. Syahril S.E selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak pada tanggal 14 Desember 2011 beliau mengatakan :

“Sebenarnya kami dari BLH sudah beberapa kali menegur bagi para pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit, cuman para pengusaha walet tetap berkeras tidak mau untuk mengikuti peraturan yang telah ada.

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagai salah satu instansi yang

berwenang sebagai pelaksana pengawasan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010 tidak tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan penangkaran sarang burung walet. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak seharusnya lebih bijaksana dan tegas terhadap para pengusaha walet yang tidak mau menjalankan peraturan yang telah ada.

Setelah itu penulis melakukan wawancara salah satu Tokoh Politik yang ada di Kecamatan Sungai Apit yaitu Bapak Dadang Saputra dia adalah anggota DPRD kabupaten siak saat ini. Yang mana mengenai Kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet yang hari ini lokasi penangkaran sarang burung walet lebih banyak dilaksanakan penangkaran walet lokasi lahan produktif dan bukan lahan terlantar. Dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Dadang Saputra pada tanggal 14 Desember 2011 beliau mengatakan:

“Lemahnya pengawasan pemerintah Daerah Kabupaten Siak khususnya lembaga terkait yaitu BLH Kabupaten Siak ini menjadi kesempatan besar bagi pengusaha walet yang tidak mau mengikuti aturan yang ada, seharusnya badan lingkungan hidup lebih tegas dalam menangani bagi para pengusaha walet yang tidak mau mentaati aturan yang ada.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Tokoh politik Kecamatan Sungai Apit tersebut dapat dinyatakan bahwa peranan pemerintah daerah kabupaten kurang tegas dalam mengawasi penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit, sehingga pengusaha walet merajalela untuk mengadakan penangkaran dilokasi lahan produktif, sehingga masyarakat sekelilingnya sangat merasa terganggu.

5.4.Lokasi Prioritas Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Apit.

Lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet bagi pengusaha yang ingin melakukan penangkaran sarang burung walet maka harus melakukan penangkaran didaerah lokasi yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet adalah mengatur tentang lokasi penangkaran sarang burung walet yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang mana lokasi prioritas penangkarannya di Kecamatan Sungai Apit yaitu berlokasi, Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara Permai.

5.4.1. Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Sungai Apit berlokasi, Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara Permai.

Lokasi prioritas ini telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010, maka bagi pengusaha walet wajib mengikuti peraturan bupati yang telah ditetapkan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah Bapak/Ibu mengetahui lokasi prioritas perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit berada di Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan, dan Desa Kayu Ara Permai maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 7
Tanggapan responden mengetahui
lokasi prioritas pengusahaan penangkaran sarang burung walet di
Kecamatan Sungai Apit berada di Desa Teluk Batil,
Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan, dan Desa Kayu Ara Permai.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	3	9.1 %
2	Tidak	14	42.4 %
3	Tidak Tahu	16	48.5%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.7 di atas tanggapan responden mengenai mengetahui lokasi prioritas pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit berada di Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan, dan Desa Kayu Ara Permai, dimana yang menjawab Ya sebanyak 3 orang dengan persentase (9.1%), yang menjawab Tidak 14 dengan persentase (42.4%), sedangkan yang menjawab Tidak Tahu 16 dengan persentase (48.5%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat tidak tahu mengenai lokasi prioritas pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit.

Berdasarkan pengamatan penulis ditempat penelitian, bahwa pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak banyak tidak tahu mengenai lokasi yang diprioritaskan, sehingga pengusaha walet di Kecamatan Sungai Apit melakukan penangkaran didaerah yang tidak termasuk daerah yang diprioritaskan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010. Kondisi dilapangan penulis mengamati tidak ada satupun pengusaha

walet yang mengadakan Penangkaran Sarang Burung Walet didaerah lokasi yang diprioritaskan.

5.4.2. Pusat Kota Kecamatan Sungai Apit Tidak Termasuk Daerah Penangkaran Sarang Burung Walet.

Penangkaran sarang burung walet, Kota Kecamatan Sungai Apit tidak termasuk daerah penangkaran walet, karena tidak ada Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010 menyebut kota kecamatan termasuk daerah yang diprioritaskan dalam penangkaran walet.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Apakah lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Sudah Sesuai dengan lokasi prioritas maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 8
Tanggapan responden mengenai
lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit
sudah sesuai dengan lokasi prioritas.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	5	15.15 %
2	Tidak	13	39.4 %
3	Tidak Tahu	15	45.45%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.8 di atas tanggapan responden mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Sudah Sesuai dengan lokasi prioritas, dimana yang menjawab Ya sebanyak 5 orang dengan persentase (15.15%), yang menjawab Tidak 13 dengan persentase (39.4%), sedangkan yang menjawab Tidak Tahu 15 dengan persentase (45.45%).

Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat tidak tahu mengenai Lokasi yang diprioritaskan pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit.

Ada beberapa responden yang menuliskan alasannya dilembaran kuisioner mengenai Apakah lokasi penangkaran sarang burung walet dikecamatan sungai apit sudah sesuai dengan lokasi prioritas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kami dari pengusaha walet tidak tahu menahu dengan adanya daerah lokasi yang diprioritaskan untuk penangkaran sarang burung walet.
- b. Bangunan yang kami jadikan penangkaran sarang burung walet ini sudah tahun 2005 kami jadikan penangkaran sarang burung walet, selama ini kami tidak tahu yang mana lokasi diprioritaskan dan mana lokasi tidak diprioritaskan penangkaran burung walet.
- c. Lokasi yang kami adakan penangkaran sekarang sangat strategis sekali karena burung walet sangat banyak sekali didaerah laut apalagi bangunan penangkaran burung walet dekat dengan laut Pasar Sungai Apit.
- d. Lokasi penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit sudah sesuai dengan lokasi prioritas.

Berdasarkan pengamatan penulis ditempat penelitian, sebagian besar pengusaha walet tidak tahu yang mana lokasi yang diprioritaskan, pada hal dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010 sudah jelas menyatakan bahwa daerah yang diprioritaskan untuk penangkaran sarang burung walet didaerah Kecamatan Sungai Apit yaitu berlokasi Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan, dan Desa Kayu Ara Permai. Sedangkan kota

kecamatan tidak termasuk dalam lokasi diprioritaskan dalam penangkaran walet, malahan tidak boleh melakukan penangkaran di daerah pusat kota kecamatan, penulis mengamati bahwa ada ketidakpahaman bagi pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit masalah lokasi yang diprioritaskan, kurangnya sosialisasi dan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terutama BLH Kabupaten Siak baik dalam mengawasi maupun dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Dan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai Apakah pengusaha penangkaran sarang burung walet mendapatkan sosialisasi dari BLH terhadap pelarangan penangkaran sarang burung walet disekitar kawasan tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 9
Tanggapan responden mengenai sosialisasi dari BLH terhadap
pelarangan penangkaran walet disekitar kawasan tempat fasilitas umum
dan fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Sungai Apit

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Sering	4	12.1 %
2	Cukup Sering	11	33.4%
3	Sangat Tidak Sering	18	54.5%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.9 di atas tanggapan responden mengenai Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet mendapatkan sosialisasi dari BLH terhadap pelarangan penangkaran sarang burung walet disekitar kawasan tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak, dimana yang menjawab Sering sebanyak 4 orang dengan persentase (12.1%), yang menjawab Cukup Sering 11 dengan persentase (33.4%), sedangkan yang menjawab sangat Tidak Sering 18 dengan persentase (54.5%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat sangat tidak sering mendapatkan sosialisasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap pelarangan penangkaran sarang burung walet disekitar kawasan tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Dari tanggapan responden diatas tentang lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit penulis mengadakan pengamatan dilapangan bahwa banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak tahu dengan lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet sehingga para pengusaha burung walet lebih banyak mengadakan penangkaran di daerah pemukiman masyarakat dan daerah Perkotaan Kecamatan Sungai Apit ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak terhadap para pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwasanya Salah satu faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 tidak terlaksana adalah lambatnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 kepada masyarakat, khususnya kepada pengusaha walet. Inipun terbukti dengan simpang siurnya proses sosialisasi peraturan daerah tersebut yang dilakukan kepada pengusaha walet.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Tokoh Politik yang ada di Kecamatan Sungai Apit yaitu Bapak Zulfi Mursal sekaligus dia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Siak sekarang, Bapak Zulfi Mursal mengatakan bahwa sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun 2008 terlalu lambat dilakukan kepada masyarakat maupun pengusaha walet. Seharusnya setelah Perda disahkan maka harus dilakukan sosialisasi secepatnya kepada masyarakat dan pengusaha walet, agar tidak ada alasan bagi para pengusaha walet untuk tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tersebut. Berikut adalah kutipan langsung dari Pernyataan Bapak Zulfi Mursal pada Tanggal 14 Desember 2011:

“Sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun 2008 lambat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat dan pengusaha. Banyak masyarakat bahkan pengusaha walet sendiri yang belum tahu keberadaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 ini pada tahun pertama Perda disahkan. Hal ini juga disebabkan karena pihak Kecamatan tidak dilibatkan sama sekali dalam urusan Penangkaran Walet. Sehingga untuk Kecamatan yang jaraknya jauh dari Kabupaten Siak seperti Kecamatan Sungai Apit sulit untuk mendapatkan informasi dengan cepat”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulfi Mursal tersebut dapat dilihat bahwa sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun 2008 memang lambat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat dan para pengusaha walet, sehingga para pengusaha walet tidak tau yang mana kriteria lokasi dan lokasi yang diprioritaskan untuk penangkaran sarang burung walet. Salah satu penyebab yaitu karena dalam urusan penangkaran walet Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tidak menempatkan instansi yang berwenang di daerah Kecamatan. Bahkan pihak

kecamatanpun tidak dilibatkan sama sekali dalam urusan penangkaran sarang burung walet. Hal ini menyebabkan proses sosialisasi berjalan secara lamban dan informasi lambat sampai kepada masyarakat dan pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit.

Setelah itu penulis melakukan wawancara lagi dengan Ibuk Irma Suriani sebagai Sekretaris BLH Kabupaten Siak, untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun 2008 tersebut. Ketereangan yang diberikan oleh Bapak Suprianto berbanding dengan keterangan yang diberikan Bapak Zulfi Mursal tersebut. Bapak Suprianto mengatakan bahwa dari awal pembuatan Perda No 04 Tahun 2008 pengusaha-pengusaha tersebut telah diundang dalam forum dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan Intansi-intansi terkait untuk membahas pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2008 juga telah dilakukan sosialisai kepada masyarakat khususnya kepada pegusaha walet, namun dalam pelaksanaanya pengusaha tidak patuh kepada aturan-aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet. Pengusaha walet sering memamfaatkan kelalain dari pemerintah daerah dan Instansi-intansi terkait. Berikut ini adalah kutipan langsung dari Bapak Supriyanto pada Tanggal 15 Desember 2011:

“Dari awal pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2008 pengusaha-pengusa walet telah kita undang dalam forum dengar pendapatan bersama pemerintah daerah dan kami dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas-Dinas terkait lainnya untuk membahas pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2008. Kemarin semuanya setuju-setuju saja kok!, setelah Perda Nomor 4 Tahun 2008 disahkan pun pada Bulan Maret 2008 juga telah dilakukan sosialisasi kepada pengusaha walet”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Supriyanto tersebut terlihat jelas bahwa pembuatan Perda Nomor 4 Tahun 2008 telah mendapat persetujuan dari semua pihak yang terkait dan bukan atas keputusan sepihak saja. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk tidak mematuhi peraturan yang sudah sama-sama disepakati tersebut.

Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian kepada pengusaha walet. Informasi yang penulis dapat dari pengusaha walet juga bertentangan dengan yang penulis dapat dari Bapak Supriyanto. Berdasarkan keterangan dari Bapak Alex (Ketua Asosiasi Walet Kecamatan Sungai Apit) bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 baru dilakukan pada tahun 2009, sehingga pada awal-awal peraturan daerah tersebut disahkan banyak pengusaha dan masyarakat yang belum tau. Sedangkan untuk urusan perizinan, pengusaha walet tidak merasa keberatan, bahwa ingin segera mempunyai izin tersebut. Namun pengusaha merasa bingung terkait proses pengurusannya.

Berikut adalah kutipan langsung dari pernyataan Bapak Alex dalam wawancara penulis pada Tanggal 15 Desember 2011:

“Dalam urusan perizinan penagkaran walet ini, kami dari pengusaha tidak pernah mearasa keberatan, bahkan kami ingin segera mempunyai izin tersebut, namun kami merasa bingung terkait proses pengurusanya yang belum tuntas sampai sekarang. Kami komit untuk mengikuti peraturan yang ada, apalagi potensi walet ini sangat menguntungkan dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk masalah sosialisai perda tersebut kami baru diundang pada tahun 2009 untuk sosialisai”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengusaha walet sudah memiliki keinginan untuk mematuhi Perda Nomor 4 Tahun 2008, namun hanya proses perizinanya yang masih belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Intansi yang berwenang. Karena disisi lain, pengusaha walet memang telah melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008 yaitu tentang lokasi penangkaran dan lokasi diprioritaskan. Masalah utamanya yaitu masalah relokasi tempat usaha penangkaran yang belum selesai dibahas dan ditentukan oleh Intansi- intansi terkait.

5.5.Perizinan Penangkaran Walet

Perizinan penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran burung walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 dan diperkuat dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010 yang mana dalam peraturan daerah dan peraturan bupati siak tersebut menyatakan bahwa setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin pengusaha penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh kepala daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

5.5.1. Persyaratan Pengajuan Permohonan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai Apakah sudah mengurus perizinan pengusaha penangkaran sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 10
Tanggapan responden mengenai sudah mengurus
perizinan pengusaha penangkaran sarang burung walet

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	30	90.9%
2	Tidak	2	6.1%
3	Tidak Tahu	1	3.0%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.10 di atas tanggapan responden mengenai sudah mengurus perizinan pengusaha penangkaran sarang burung walet, dimana yang menjawab Ya sebanyak 30 orang dengan persentase (90.9%), yang menjawab Tidak 2 dengan persentase (6.1%), sedangkan yang menjawab Tidak Tahu 1 dengan persentase (3.0%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat sudah mengurus perizinan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit.

Dari hasil penyebaran kuesioner ada beberapa tanggapan responden yang menuliskan alasannya sebagai berikut:

- a. Sampai hari ini saya tidak mendapatkan surat izin penangkaran, pada hal sudah hampir satu tahun saya mengurusnya tidak kunjung keluar juga izinnya.
- b. Kami tidak tahu kenapa pemerintah daerah kabupaten siak tidak mau mengeluarkan izin penangkaran sarang burung walet.

- c. Tahun 2009 saya sudah mengurus izin penangkaran walet tapi sekarang udah tahun 2011 tidak juga dikeluarkan izin penangkarannya.
- d. Kapanlah surat izin penangkaran sarang burung walet kami dikeluarkan.

Penulis melakukan pengamatan ditempat penelitian, bahwasanya penguasha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit sudah mengurus izin penangkaran sarang burung walet, tetapi sampai hari ini para pengusaha walet banyak mengeluh, karena permohonan izin penangkaran sudah hampir dua tahun sudah diajukan kepada kantor KPTSP tapi tak kunjung keluar juga izinnya.

Untuk mencari kebenaran informasi mengenai hal perizinan maka penulis langsung melakukan wawancara kepada Bapak Khairul Amin (Kepala Kantor KPTSP) untuk mendapatkan informasi tentang perizinan penangkaran sarang burung walet. Bapak Khairul Amin mengatakan bahwa memang sudah ada permohonan izin penangkaran dari pengusaha walet Kecamatan Sungai Apit, tapi itupun baru diajukan pada tahun 2010 kemarin. Dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Kahirul Amin pada tanggal 15 Desember 2011 beliau mengatakan:

“Pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memang sudah ada yang mengajukan permohonan izin penangkaran sarang burung walet, cuman, kita harus ikut prosedur dulu, karena kami butuh konsultasi dahulu dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Layak dan tidak layak nya diberikan izin tergantung kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Siak”.

5.5.2. Jangka Waktu Perizinan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai Berapa lamakah jangka waktu perizinan perusahaan penangkaran sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 11
Tanggapan responden berapa lamakah jangka waktu perizinan
perusahaan penangkaran sarang burung walet

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	4 Tahun	7	21.2%
2	5 Tahun	3	9.1%
3	Tidak Tahu	23	69.6%
Jumlah		33	100%

Sumber : Data Olahan 2011

Dari tabel V.11 di atas Tanggapan Responden mengenai Berapa Lamakah Jangka Waktu Perizinan Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet, dimana yang menjawab 4 (Empat) Tahun sebanyak 7 orang dengan persentase (21.2%), yang menjawab 5 (Lima) Tahun dengan persentase (9.1%), sedangkan yang menjawab tidak tahu 23 dengan persentase (69.6%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat tidak tahu berapa lama jangka waktu Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Pengamatan penulis ditempat penelitian, bahwasanya para pengusaha walet banyak yang tidak tahu dengan jangka waktu perizinan yang berlaku, ini dikarenakan pengusaha walet belum pernah mengantongi surat izin penangkaran, sehingga tidak tahu jangka waktu perizinan berlaku.

Dengan adanya kepengurusan dalam Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet maka bagi pengusaha walet akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010.

5.5.3. Biaya Perizinan

Biaya perizinan telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010, Untuk melihat tanggapan responden mengenai Apakah Biaya Mengurus Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet sangat mahal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.12
Tanggapan Responden biaya mengurus
Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet sangat mahal

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	6	18.2%
2	Tidak	8	24.2%
3	Tidak Tahu	19	57.6%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel V.12 di atas Tanggapan Respoden mengenai biaya mengurus Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet sangat mahal, dimana yang menjawab ya sebanyak 6 orang dengan persentase (18.2%), yang menjawab tidak dengan persentase (24.2%), sedangkan yang menjawab tidak tahu 19 dengan persentase (69.6%). Dengan demikian sebagian besar responden berpendapat tidak tahu mengenai biaya mengurus Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet sangat mahal atau tidak

Berdasarkan pengamatan penulis ditempat penelitian, bahwa para pengusaha walet bannyak tidak tahu mengenai biaya perizinan walet, ini dikarenakan para pengusaha walet yang ada Dikecamatan Sungai Apit belum ada mengantongi izin sehingga para pengusaha walet tidak tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam pengurusan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Untuk melihat tanggapan responden apakah berakhirnya Perizinan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet akan mengurus perizinan lagi. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.13
Tanggapan Responden berakhirnya perizinan pengusaha
penangkaran sarang burung walet akan mengurus perizinan lagi.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Ya	33	100%
2	Tidak	-	0%
3	Tidak Tahu	-	0%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel V.13 di atas tanggapan responden mengenai berakhirnya perizinan penangkaran sarang burung walet akan mengurus perizinan lagi, dimana yang menjawab ya sebanyak 33 orang dengan persentase (100%).

Dari jawaban responden mengenai berakhirnya perizinan penangkaran sarang burung walet akan mengurus perizinan lagi, para pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit akan mengurus lagi kalau surat izinnya sudah habis waktunya, tapi, para pengusaha walet mengeluh sampai saat ini Surat izin penangkaran sarang burung walet tidak kunjung keluar juga.

Dalam urusan pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Dinas Kehutanan dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk mengurus dan memproses permohonan izin diajukan oleh pengusaha. Namun faktanya sampai akhir tahun 2011, kedua Dinas yang diberikan wewenang tersebut belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Untuk mencari kebenaran informasi mengenai hal perizinan maka penulis langsung melakukan wawancara kepada Bapak Yuliaswandari (kepala kantor KPTSP) untuk mendapatkan informasi tentang perizinan penangkaran sarang burung walet. Bapak Yuliaswandari mengatakan bahwa memang sudah ada permohonan izin penangkaran dari pengusaha walet Kecamatan Sungai Apit, tapi itupun baru diajukan pada tahun 2010 kemarin. Dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Yuliaswandari sebagai berikut:

“ Permohonan izin penangkaran sarang burung walet memang sudah banyak kami terima dari pengusaha, tapi kami belum bisa memberikan izin langsung karena kami harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008, setiap surat permohonan yang masuk harus mendapatkan teknis lokasi penangkarannya dari Dinas Kehutanan, jika semuanya sudah beres maka kami akan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan untuk mengeluarkan surat izin, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan surat rekomendasi tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa koordinasi antar Instansi-instansi terkait tidak terlaksana dengan baik. Instansi-instansi tersebut terlihat seperti saling lepas tanggung jawab satu sama lainnya. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) yang diberikan wewenang dalam proses

perizinan tidak berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Kehutanan. Terlihat jelas KPTSP hanya bersipat menunggu rekomendasi dari Dinas Kehutanan. Kenapa sampai memakan waktu yang hingga Dua Tahun menunggu rekomendasi tersebut, jika memang terjadi kesalahan atau menghadapi kendala, kenapa tidak diselesaikan secara bersama dari awal secepatnya.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) sebagai salah satu Instansi yang berwenang sebagai pelaksana Perda Nomor 04 Tahun 2008 kurang memahami dan kurang tegas dalam menjalankan Perda tersebut. Karena sudah jelas pengusaha yang mengajukan surat permohonan izin penangkaran yaitu tidak mematuhi ketentuan tata ruang daerah Kabupaten Siak dengan melakukan penangkaran didalam pasar dan pemukiman penduduk. Sehingga salah sudah pasti persyaratan teknis permohonan izin penangkarannya tidak lengkap yaitu tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan. Seharusnya KPTSP bersama dengan Dinas Kehutanan lebih tegas terhadap hal tersebut, dan berkoordinasi dengan Kepala Daerah dari awal-awal kemarin untuk menertibkan surat penolakan. Karena dalam Perda Nomor 04 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat (3) telah disebutkan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Daerah wajib menerbitkan surat penolakan permohonan penangkaran sarang burung walet.

Kemudian penulis melakukan pengamatan (Observasi) terhadap Dinas Kehutanan kenapa Dinas Kehutanan terlibat juga dalam memberikan rekomendasi tentang terbitnya surat izin pengusaha penangkaran sarang burung walet, Dinas Kehutanan Kabupaten Siak ternyata mempunyai

wewenang untuk memeriksa pertimbangan teknis lokasi penangkaran ini sudah tercantum dalam Perda Nomor 04 Tahun 2008. Pertimbangan teknis tersebut berupa pertimbangan tentang lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penangkaran yang tidak melanggar aturan tata ruang daerah Kabupaten Siak. Apabila semuanya sudah lengkap dan penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha walet tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang daerah, maka Dinas Kehutanan akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk menerbitkan surat izin penangkaran. Berikut ini adalah kutipan langsung dari hasil wawancara penulis kepada Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, yaitu Bapak Padli pada Tanggal 16 Desember 2011 beliau mengatakan:

“Memang sudah ada permohonan izin yang diminta, namun kami belum dapat memberikan rekomendasi kepada kantor KPTSP untuk mengeluarkan izin tersebut, karena untuk izin lokasinya, ada aturannya, harus sesuai dengan kriteria lokasi dan lokasi prioritas yang telah ditetapkan Perda Nomor 04 Tahun 2008. Sedangkan para pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit itu telah melanggar ketentuan tata ruang daerah. Untuk pembahasan tersebut nantinya ada dari Dinas Tata Ruang PU dan juga kami dari Dinas Kehutanan”.

Terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terkesan sangat lamban dalam menyelesaikan permasalahan perizinan penangkaran sarang burung walet tersebut. Pada hal Perda Nomor 04 Tahun 2008 sudah Tiga Tahun disahkan. Seharusnya jika memang pengusaha penangkaran sarang burung walet melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 04 Tahun 2008 yaitu lokasi penangkaran, maka permohonan izin penangkaran tersebut tidak perlu diproses hingga memakan waktu yang sangat lama bahkan sampai

Dua Tahun. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi para pengusaha untuk tidak melakukan relokasi usahanya. Sehingga pengusaha-pengusaha tersebut menikmati hasil penangkarnya selama Dua Tahun ini tanpa mengeluarkan Biaya Retribusi Perizinan dan tidak bisa dikenakan pajak pendapatan hal ini akibat kelalaian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dinas-dinas terkait.

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak seharusnya lebih tegas terhadap permasalahan tersebut, jika memang lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit tidak sesuai dengan ketentuan maka harus dilakukan relokasi secepatnya, agar izin bisa dikeluarkan dan daerah mendapat retribusi dari perizinan dan pajak pendapatan usaha walet tersebut. Dinas-dinas terkaitpun harus berkoordinasi dengan baik dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah tersebut.

5.6.Suara Pita Kaset Burung Walet

Suara pita kaset burung walet adalah tata cara dalam melaksanakan membunyikan suara pita kaset burung walet yang mana larangan membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15.00 Wib sampai dengan 19.30 Wib.

5.6.1.Larangan membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15.00 s/d 19.30 Wib.

Larangan membunyikan suara pita kaset burung walet ini memang telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010, yang mana

membunyikan suara pita kaset burung walet harus sesuai dengan peraturan Bupati Siak tersebut, jam berapa yang boleh dibunyikannya dan jam berapa yang dilarang membunyikan suara pita kaset burung walet.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Apakah larangan membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15 s/d 19.30 wib, apakah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak sudah pernah mensosialisasikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.14
Tanggapan Responden mengenai larangan membunyikan Suara Pita Kaset Burung Walet kecuali pada pukul 15 s/d 19.30 wib, apakah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak sudah pernah mensosialisasikannya.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	5	15.2 %
2	Sering	7	21,2 %
3	Tidak pernah	21	63,6%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel V.14 di atas tanggapan responden mengenai larangan membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15 s/d 19.30 wib, apakah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak sudah pernah mensosialisasikannya, dapat dilihat bahwa dari 33 orang responden yang ditemui oleh Penulis, 5 orang responden dengan persentase (15.2%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden pengusaha sangat sering mendapat informasi yang dibutuhkan tentang terhadap larangan membunyikan pita kaset burung walet kecuali pada pukul 16.00 s/d 19.00

wib, dari petugas BLH saat melakukan pemantauan, sehingga pengusaha walet dapat lebih memahami terhadap larangan ini dengan baik.

Sedangkan 21 orang responden dengan persentase (63,6%) mengatakan tidak pernah, ini dikarenakan menurut responden pengusaha walet merasa tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan terhadap larangan tersebut, sehingga akibatnya masih terdapat pengusaha walet yang membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul yang telah ditentukan.

Sesuai dengan wawancara Penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Amat Pasir dia mengatakan:

“ Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak memang tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan waktu membunyikan suara pita kaset, sehingga masyarakat yang disekeliling penangkaran sarang burung walet ini merasa resah dengan bunyian suara pita sarang burung walet tersebut, dan pengusaha walet pun tidak pernah berfikir membunyikan suara pita kaset walet sampai- sampai malampun masih terdengar suara pita walet itu berkicau dan sangat menyakitkan telinga masyarakat. Saya berharap pemerintah daerah kabupaten maupun dari BLH tolong ini cepat di evaluasi kembali masalah penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit ini”. (Dengan Suara Lantang).

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa larangan terhadap membunyikan suara pita kaset burung walet tidak pernah pihak BLH mensosialisasikan kepada pengusaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit, sehingga pengusaha sarang burung walet sewena-

wenanya untuk menghidupkan suara pita walet dan ini sangat mengganggu ketentraman bagi masyarakat sekitarnya.

Setelah itu penulis ingin mendapatkan informasi yang jelas masalah larangan membunyikan suara pita kaset walet yang telah ditentukan waktu membunyikan nya. Maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Anhar salah satu pegawai BLH (Kasubbid pengawasan dan pengendalian) dia menyatakan:

“Sosialisasi tentang larangan membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15 s/d 19.30 wib ini sudah kami sosialisasi pada tahun 2010 kepada pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit, tapi, kondisi dilapangan banyak pengusaha-pengusaha walet yang tidak mau mengikuti aturannya”.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Darul Hakim maka penulis dapat melihat bahwa dari BLH sudah mensosialisasikan nya tentang larangan membunyikan suara pita kaset yang telah ditentukan waktunya, tapi dari pihak BLH sebagai wewenang penuh terhadap pengawasan penangkaran sarang burung walet kurang tegas dalam melakukan pengawasan, pada hal banyak yang terjadi dilapangan para pengusaha walet telah melanggar aturan yag telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Sehingga masyarakat sekitarnya merasa resah dengan adanya bunyian kaset burung walet tidak tahu aturan menghidupkan nya.

5.6.2. Dilarang membunyikan suara pita kaset melebihi 55 desibel (db)

Dilarang membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desible (db) ini memang telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 26

Tahun 2010, dengan tujuan supaya tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitarnya.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai larangan membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.15
Tanggapan Respoden dalam Membunyikan Suara Pita Kaset
Burung Walet melebihi 55 desibel (db)

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	4	81,8%
2	Sering	27	12,1%
3	Tidak pernah	2	6,0%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel V.15 diatas tanggapan responden Apakah Bapak/Ibu pernah membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel (db), dapat dilihat bahwa dari 33 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 27 orang responden dengan persentase (81,8%) mengatakan Sering, hal ini dikarenakan menurut responden banyak petugas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak kurang tegas memberikan informasi terhadap membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel ini, sehingga pengusaha masih banyak membunyikan pita kaset walet melebihi 55 desibel. Sedangkan 2 orang responden dengan persentase (6,0%) mengatakan Tidak Pernah, ini dikarenakan menurut responden banyaknya masyarakat yang komplin dengan suara pita walet yang sangat mengganggu masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Sungai Apit, yaitu Bapak Drs. H. Yasir dia menyatakan:

“ Suara pita kaset yang dibunyikan oleh pengusaha walet yang ada di kecamatan sungai apit ini sudah melampaui batas sehingga sangat mengganggu ketentraman masyarakat, pada hal lokasi penangkaran sangat dekat sekali dengan perumahan masyarakat, yang diherankan lagi disamping masjidpun ada yang melakukan penangkaran sarang burung walet, kalau masyarakat lagi melaksanakan shalat jama'ah di masjid suara pita walet itu sangat mengganggu berjalannya ibadah jama'ah yang ada di masjid.

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah daerah kabupaten khususnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tidak pernah melakukan pengawasan mengenai larangan menghidupkan suara pita kaset kecuali pada waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010, padahal ini sudah menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak untuk bisa menertibkan lagi bagi para pengusaha walet yang tidak mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh bupati siak pada tahun 2010.

Sewaktu peneliti melakukan observasi ke salah satu lokasi yang banyak pengusaha walet di Jalan Hangtuah dan di Jalan Diponegoro bertepatan di lokasi Pasar Sungai Apit Kabupaten Siak bahwa masih banyak pengusaha walet yang melanggar peraturan daerah dan peraturan bupati siak. Sehingga dari jawaban responden dengan menggunakan teknik angket dengan responden serta observasi dapat dilihat bahwa dalam membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel (db) tidak ada pengawasan langsung

dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak, karena masih banyak pengusaha membunyikan pita kaset burung walet melebihi 55 desibel (db), sehingga larangan terhadap hal ini belum berjalan secara baik.

5.7. Rekapitulasi Jawaban Responden dalam setiap Sub Variabel Penelitian.

Secara keseluruhan, rekapitulasi dan analisis hasil penelitian terhadap masing-masing sub variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.7.1. Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet

Tabel V.16
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kriteria Lokasi
Penangkaran Sarang Burung Walet

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 KM dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial	8	22	3	100%
2	Kepadatan penduduk rendah sampai sedang	15	17	1	100%
3	Lahan terlantar dan bukan lahan produktif	7	24	2	100%
Jumlah		30	63	6	100%
Rata-rata		10	21	2	33
Jumlah Rata-rata		30.30 %	63.64 %	6.06 %	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 3 indikator yang diteliti dari sub variabel kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet, tanggapan responden yang menyatakan Ya 30, kemudian yang menyatakan Tidak jumlahnya 63, dan yang menyatakan Tidak Tahu jumlahnya 6.

Kemudian untuk mengetahui apakah kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet sudah sesuai dengan kriteria lokasi penangkaran adalah dengan

mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Ya adalah 10 orang atau 30,30 %, dan responden yang menyatakan Tidak adalah 21 orang atau 63,64 %, dan responden yang menyatakan Tidak Tahu adalah 2 orang atau 6,06 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 3 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit tidak berada didaerah kriteria lokasi mengacu pada 21 orang atau 63,64 % responden yang menyatakan Tidak.

5.7.2. Lokasi Prioritas Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Apit

Tabel V.17
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Lokasi Prioritas
Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sungai Apit

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit berolaksikan, Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara	3	14	16	100%
2	Pusat kota kecamatan Sungai Apit tidak termasuk daerah penangkaran wallet	5	13	15	100%
Jumlah		8	27	31	100%
Rata-rata		4	13,5	15,5	33
Jumlah Rata-rata		12,12%	40,91%	46,97%	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 2 indikator yang diteliti dari sub variabel lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet dikecamatan sungai apit, tanggapan responden yang menyatakan Ya jumlahnya 9, kemudian yang menyatakan Tidak jumlahnya 27, dan yang menyatakan Tidak Tahu jumlahnya 31.

Kemudian untuk mengetahui apakah lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit sudah sesuai dengan lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Ya adalah 8 orang atau 12,12 %, dan responden yang menyatakan Tidak rata-ratanya adalah 13,5 atau 40,91 %, dan responden yang menyatakan Tidak Tahu rata-ratanya adalah 15,5 atau 46,97%. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 2 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa Lokasi prioritas Penangkaran Sarang Burung Walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit tidak berada didaerah lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet. hal ini mengacu pada 15,5 atau 46,97 % responden yang menyatakan Tidak Tahu

5.7.3. Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet

Tabel V.18
Rekapitulasi Jawaban Responden
Tentang Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Ya	Tidak	Tidak Tahu	
1	Persyaratan pengajuan permohonan	30	2	1	100%
2	Jangka waktu perizinan	3	7	23	100%
2	Biaya perizinan	6	8	19	100%
3	Berakhirnya perizinan	33	-	-	100%
Jumlah		72	17	43	100%
Rata-rata		18	4,25	10,75	33
Jumlah Rata-rata		54,55 %	12,88 %	32,57 %	100%

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 4 indikator yang diteliti dari sub variabel Perizinan Penangkaran Sarang Burung Walet, tanggapan responden yang menyatakan Ya jumlahnya 76, kemudian yang menyatakan Tidak jumlahnya 13, dan yang menyatakan Tidak Tahu jumlahnya 43.

Kemudian untuk mengetahui apakah pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit sudah pernah mengurus perizinan penangkaran sarang burung walet adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Ya rata-ratanya adalah 18 atau 54,55%, dan responden yang menyatakan Tidak rata-ratanya adalah 4,25 atau 12,88 %, dan responden yang menyatakan Tidak Tahu rata-ratanya adalah 10,75 atau

32,57 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 4 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengusaha penangkaran Sarang Burung Walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit sudah pernah mengurus perizinan penangkaran sarang burung walet. hal ini mengacu pada 18 atau 54,55 % responden yang menyatakan Ya.

5.7.4. Suara Pita Kaset Burung Walet

Tabel V.19
Rekapitulasi jawaban responden
suara pita kaset burung walet

No	Indikator	Tanggapan Responden			Persentase (%)
		Sangat Sering	Sering	Tidak Pernah	
1	Dilarang membunyikan pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15.00 s/d 19.30 wib	5	7	21	100%
2	Dilarang membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel (db)	4	27	2	100%
Jumlah		9	34	23	100%
Rata-rata		4.5	17	11.5	33
Jumlah Rata-rata		13,64%	51,52%	34,84%	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 2 indikator yang diteliti dari sub variabel tentang Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 yaitu larangan membunyikan suara pita kaset burung walet tanggapan responden yang menyatakan Sangat Sering jumlahnya 9, kemudian yang menyatakan Sering jumlahnya 34, dan yang menyatakan Tidak Pernah jumlahnya 23.

Kemudian untuk mengetahui apakah pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit dalam hal larangan membunyikan suara pita burung walet adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Sangat Sering rata-ratanya adalah 4,5 atau 13,64%, dan responden yang menyatakan Sering rata-ratanya adalah 17 atau 51,52 %, dan responden yang menyatakan Tidak Pernah rata-ratanya adalah 11,5 atau 34,84 %. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 2 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pengusaha penangkaran Sarang Burung Walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit sering membunyikan suara pita kaset burung walet tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010, hal ini mengacu pada 17 atau 51,52 % responden yang menyatakan Sering.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah dilakukan penulis mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit), maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkapanya, penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

6.1.Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Apit) **Tidak Terlaksana dengan Baik**. Hal ini di terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 4 (Empat) Sub Variabel dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet tersebut yaitu:

1. Kriteria Lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet, yang mana Kriteria Lokasi Penangkaran yang ada di Kecamatan Sungai Apit Para Pengusaha Walet tidak melakukan penangkaran sesuai dengan Kriteria Lokasi Penangkaran yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 dan diperkuat dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 (Tabel V.14). hal ini disebabkan lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya Instansi Badan Lingkungan

Hidup (BLH) Kabupaten Siak yang berwenang menangani masalah penangkaran sarang burung walet tidak berjalan pengawasannya terhadap pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pengusaha sarang burung walet tidak berada di lokasi prioritas penangkaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 (tabel V.15). dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebabnya adalah ketidaktahuan para pengusaha tentang lokasi prioritas penangkaran sarang burung walet. Hal ini menunjukkan lambatnya sosialisasi maupun pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak terhadap para pengusaha walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit, sehingga banyak para pengusaha walet yang mengadakan penangkaran dipemukiman masyarakat maupun dekat dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
3. Perizinan Penangkaran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa sebagian besar pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah pernah mengajukan permohonan izin penangkaran (tabel V.16). berdasarkan pengamatan yang diperkuat dengan hasil wawancara penulis di lokasi penelitian, diketahui bahwa masalah Perizinan Penangkaran Sarang

Burung Walet sampai tahun 2011 ini masih belum ada kejelasan. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Instansi-instansi terkait belum bisa mengeluarkan surat izin penangkaran untuk pengusaha-pengusaha penangkaran sarang burung walet yang mengajukan permohonan. Sehingga sampai saat ini, pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum ada yang mempunyai izin penangkaran.

4. Suara Pita Kaset Burung Walet. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak melanggar Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 (Tabel V.17). hal ini diketahui dari seringnya pengusaha penangkaran sarang burung walet membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi peraturan yang telah ditetapkan. Yaitu larangan membunyikan pita kaset burung walet kecuali pada pukul 15.00 s/d 19.030 wib dan larangan membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel (db), hal ini menunjukkan tidak berjalannya pemantauan dan pengawasan dari instansi BLH Kabupaten Siak.

6.2. Saran

1. Pemerintah Daerah dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak harus melakukan pengecekan ulang terhadap pelanggaran penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Isntansi-isntansi terkait harus berkoordinasi secepatnya untuk melakukan relokasi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet, sehingga Penangkaran Sarang Burung Walet dipermukiman masyarakat dapat segera diatasi dan izin penangkaran bisa dikeluarkan sehingga PAD Kabupaten Siak bertambah dari penerimaan retribusi perizinan dan pajak pendapatan Penangkaran Sarang Burung Walet.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus menentukan instansi yang benar-benar mampu dan punya tanggung jawab terhadap Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengusaha walet yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 dan Peratauran Bupati Nomor 29 Tahun 2010.
5. Pengawasan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 04 Tahun 2008 tersebut harus selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel. 2000. *Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Effendy. 2003. *Pengawasan Organisasi Pemerintah*, Rineka Cipta. Jakarta
- Handoko, T Hani, 1998, *Metode-metode Penilaian Kinerja*, BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Kansil, CST. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jilid 1 Cet. Ketiga, Rineka cipta. Jakarta
- Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAPI. Yogyakarta
- Lateif, Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*, UII Press. Yogyakarta
- Manan, Bagir. 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta
- N. Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University. Yogyakarta
- Nanang Fattah. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta
- Rivai, Veitzal. 2004. *Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- _____, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Cet. Kelima Rineka Cipta. Jakarta

Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta. Bandung

Thoha, Miftah. 2005. *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Sinar Baru. Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang *Izin
Penangkaran Sarang Burung Walet*

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2010 Tentang *Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008
Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet*